

Suwardi



International SEMINAR on Zakat

Financial inclusiveness of the poor: beyond microfinance

Editor:

Sudirman

Erik Sabti Rahmawati

Ramadhita



Sharia Faculty Maulana Malik Ibrahim
State Islamic University Malang



International SEMINAR on Zakat

Financial inclusiveness of the poor: beyond microfinance

Editor:
Sudirman
Erik Sabti Rahmawati
Ramadhita

**INTERNATIONAL SEMINAR ON ZAKAT
FINANCIAL INCLUSIVENESS OF THE POOR: BEYOND MICROFINANCE**
© UIN-Maliki Press, 2015

All right reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission in writing from the publishers.

Editor:

Sudirman

Erik Sabti Rahmawati

Ramadhita

UMP : 150029

ISBN: 978-602-1190-56-2

Published by:

UIN-MALIKI PRESS

Jalan Gajayana 50 Malang

East Java Indonesia 65144

Phone/Faximile +62 341 573225

E-mail: uinmalikipress@gmail.com

Website://press.uin-malang.ac.id

FOREWORD

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga kita masih senantiasa memegang teguh keimanan, keislaman, dan keihisanan kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dan berkat rahmat Allah dan kasih sayang-Nya, International Seminar on Zakat dengan tema: "Strengthening Zakat For Socio Economic Development" UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2015 ini berhasil dilaksanakan dengan baik.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memback-up dan mendukung *International Seminar on Zakat* ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua orang yang terlibat dalam mensukseskan *International Seminar on Zakat*, yang tentu tidak bisa kami sebutkan namanya secara satu persatu. Kegiatan ini pada khususnya merupakan salah satu wadah bagi dosen, mahasiswa, praktisi, hakim Pengadilan Agama, dan praktisi lembaga zakat untuk dapat mendiskusikan lebih mendalam tentang posisi zakat dalam berbagai perspektif.

Laporan kegiatan yang cukup singkat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban panitia dalam menyelenggarakan kegiatan seminar internasional sebagai perwujudan atas tuntutan akuntabilitas publik. Di samping itu, laporan ini juga bisa dijadikan acuan bagi kegiatan berikutnya, khususnya yang akan menyelenggarakan kegiatan serupa. Meskipun demikian, tak ada gading yang tak retak, begitulah pepatah mengisyaratkan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif bagi kebaikan laporan-laporan kegiatan lainnya di masa mendatang.

Malang, 20 November 2015

Panitia

Table Of Content

FOREWORD	iii
TABLE OF CONTENT	v

TERM OF REFERENCE	1
RUNDOWN OF INTERNATIONAL SEMINAR ON ZAKAT FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	9

PRESENTED PAPER

The Opportunities and Challenges In Zakat Administration In The Muslim World <i>Nor Asiah Mohamad</i>	11
---	----

Manajemen Mutu Lembaga Zakat <i>Ahmad Juwaini</i>	31
--	----

Zakat Investasi dan Investasi Zakat dalam Perspektif Masalahah <i>Fakhruddin</i>	43
---	----

Introducing Zakat-Based Microfinance: Bank Of Zakat El-Zawa <i>Sudirman Hasan</i>	61
--	----

Contempory Zakat Development in Malaysia <i>Abd Halim Mohd Noor</i>	71
--	----

Sinergitas Lembaga Zakat dengan Lembaga Keuangan <i>Ricky Satria</i>	91
---	----

Membangun Sinergitas Lembaga Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah <i>Agustianto Mingka</i>	111
Potensi Zakat di Indonesia <i>Masdar F. Mas'udi</i>	121
Kesadaran Hukum Zakat dalam Konstitusi Negara <i>Suwandi</i>	123
Zakat Sebagai Instrumen Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teori Credo Dan Teori Existence <i>Mohamad Nur Yasin</i>	135
"Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil: Upaya Optimalisasi Peran dan Fungsi Zakat Perspektif Fiqh Al-Maqâshid" <i>Abbas Arfan</i>	145
Manajemen Zakat untuk Program Poverty Alleviation Di Indonesia dan Brunei Darussalam <i>Aan Jaelani</i>	169
Analisis Penyebab Naik dan Turunnya Pengumpulan Dana Zis Di Lazis Nu Tluwuk Wedarijaksa Pati <i>Murtadho Ridwan</i>	199
Perusahaan Sebagai Amil <i>Risma Nur Arifah</i>	215
Pengelolaan Zakat Produktif Di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqas Id Al-Syariah Ibnu 'Asyu'r <i>Moh. Toriquddin</i>	227
Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Muslim <i>Hamidi dan Budi Prihatminingtyas</i>	247

Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan <i>R.Y. Susanto</i>	255
Zakat Management For Aiding Productive Business And 9 Years Compulsory Educational Program <i>Budi Prihatminingtyas</i>	261
Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia <i>Burhanuddin S</i>	269
Zakat dan Peran Sosial <i>Nur Jannani</i>	279
Zakat, Pajak dan Kontrol Sosial <i>Achmad Khudori Soleh</i>	289
Qardhul Hasan sebagai Pola Pendistribusian Zakat Kontemporer <i>Achmad Izzudin</i>	299
IMPLEMENTATION OF SEMINAR	309
A. Tahapan Persiapan	309
B. Pelaksanaan Kegiatan	311
1. <i>Plennary Session I</i>	313
2. <i>Plennary Session II</i>	315
3. <i>Plennary Session III</i>	320
4. <i>Plennary Session IV</i>	325
5. <i>Forum Dekan Syariah/Hukum</i>	331
C. Tahapan Pasca Kegiatan	333
CLOSING	335

Term of Reference

A. Gambaran Umum

Studi Islam (Islamic studies) merupakan bidang kajian yang memiliki sejarah panjang. Luasnya cakupan studi Islam mencerminkan luasnya pengaruh Islam dalam kehidupan para pemeluknya, sebagaimana terlihat dari sejarah panjang peradaban dunia Islam, dan juga menggambarkan luasnya minat para peneliti keislaman, sebagaimana yang terlihat dari beragam sarjana dari berbagai disiplin keilmuan yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan berbagai pemerhati dan peneliti lintas agama dan negara dalam kajian keislaman memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran dinamis yang pada gilirannya akan memperkaya pemahaman tentang Islam itu sendiri. Penguatan pemahaman bidang studi keislaman ini perlu terus dilakukan, diantaranya melalui berbagai bentuk seminar dengan mengundang para peneliti dan pemerhati studi keislaman dari dalam dan luar negeri yang mengkaji Islam dari berbagai pendekatan. Perkembangan keilmuan Islam yang sedemikian pesat seringkali terlewatkan oleh akademisi dan pemerhati keislaman di Indonesia, karena kurangnya interaksi intelektual di antara mereka. Wacana dan perbincangan mutakhir tentang keislaman belum diimbangi dengan keterlibatan aktif para pengkaji dan pemerhati studi Islam di tanah air. Untuk mencairkan kebakuan wacana intelektual keislaman di tanah air, diperlukan wahana berupa seminar internasional yang mempertemukan sejumlah pakar penting di bidang keislaman dari berbagai negara, yang darinya para pengkaji dan pemerhati studi keislaman dapat menyerap temuan dan ilmu baru yang terkait dengan studi keislaman.

Seminar internasional ini merupakan upaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif dari dinamika hukum Islam konseptual serta praktis di Asia Tenggara. Hal ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan akademik bahwa gagasan hukum Islam tumbuh dalam cara yang bervariasi mempertimbangkan budaya lokal dan pemahaman umat Islam pada doktrin normatif mereka, dan bagaimana Muslim di Asia Tenggara membawa pemahaman Islam ke negara-negara mereka dalam bentuk hukum. Seminar ini juga penting dalam pembahasan sebuah "sekolah pemikiran" baru di kawasan Asia Tenggara-Arab.

Peserta seminar akan mengeksplorasi karya dan gagasan dari para pakar yang ahli dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian zakat dari perspektif yang berbeda. *International Seminar On Zakat* ini diselenggarakan oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan didukung oleh Badan Zakat Nasional untuk memeriahkan Ekspo Zakat.

Para sarjana dan orang-orang yang perhatian dalam topik dari sejumlah akademisi Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Institusi Yudikatif Peradilan Agama, juga hadir. Para akademisi sekaligus sebagai presenter dalam *Call for Papers* dengan tema zakat dan perkembangannya dalam kehidupan masyarakat. Adapun tema utama dalam kegiatan *International Seminar on Zakat* adalah: "*Strengthening Zakat For Socio Economic Development*".

B. Dasar Hukum

1. Keppres No. 50 tentang perubahan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. SK Menteri Agama RI no. 17 tahun 1961 tentang Pendirian PTAIN
3. SK Menteri Agama No. 296 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Malang
4. SK Direktorat Jenderal Bimbingan Islam No. E/136/1997 tentang Alih Status Fakultas Tarbiyah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang
5. SK Direktorat Jenderal Bimbingan Islam No. E/107/1998 tentang Pendirian Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah
6. Kepres no 50 tahun 2004 tentang Perubahan STAIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN.
7. Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 2005 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor Un.03.2/KP.01.4/572/2015, tentang panitia International Workshop on Zakat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Sebagaimana visi dan misi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang antara salah satu visi misinya yaitu membentuk keluasan ilmu pengetahuan, maka seminar internasional menjadi sebuah keniscayaan. Relevansi seminar internasional antara lain adalah untuk melihat perkembangan dinamika hukum Islam di Asia yang dititikberatkan kepada keeksistensi zakat sebagai institusi masyarakat. Selain itu juga untuk menyangga proses kesinambungan akademik perguruan tinggi Islam di tingkat Asia.

Berbagai problematika dan kasus-kasus pengelolaan zakat yang senantiasa bermunculan ditengah masyarakat dalam realitasnya bergulir sedemikian cepatnya. Anehnya fenomena dan problematika pengelolaan zakat menjadi sorotan yang sangat menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi untuk selalu dikaji dan dikembangkan guna memberikan jawaban-jawaban atas timbulnya kasus-kasus

kontemporer dalam masyarakat Islam, bukan hanya pada masyarakat Indonesia saja, tetapi problem yang sama juga dialami oleh masyarakat Islam di Asia. Oleh karena itu, seminar internasional merupakan keniscayaan untuk dilaksanakan, untuk mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dinamika perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara dengan fokus kajian pada problematika zakat dan sistem pengelolaannya.

D. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Uraian Kegiatan & Keluaran (out put)

International Seminar on Zakat ini dimaksudkan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dinamika hukum Islam Asia Tenggara, kajian dititikberatkan pada dinamika zakat dan ekonomi Islam pada masyarakat muslim dunia. Pelaksanaan *International Seminar on Zakat* ini dilaksanakan Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Indikator Kinerja

International Seminar on Zakat ini dilaksanakan dengan harapan memberikan angin segar kepada para pakar hukum Islam baik dari kalangan akademisi, praktisi, juga mahasiswa. Diskusi tentang dinamika hukum Islam sesungguhnya tidak berhenti pada kajian hukum zakat dan ekonomi Islam saja, tetapi dapat diperluas dengan kajian-kajian yang bersifat ubudiah dan lainnya, oleh karena itu indikator kinerja dalam seminar internasional diarahkan kepada proses menyeluruh dari kegiatan tersebut, baik dari segi persiapan sampai pada evaluasi kegiatan.

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan *International Seminar on Zakat* yang melibatkan beberapa pakar dari institusi pengelolaan zakat baik di Indonesia, maupun di Negara Malaysia. *International Seminar on Zakat*, dengan tema *Strengthening Zakat For Socio Economic Development*, dengan fokus kajian kepada bidang zakat dan system pengelolaannya, yang dikaji dari berbagai perpektif. Kajian zakat dalam seminar internasional inilah yang menjadi focus dalam diskusi-diskusi pada session presentasi *call for papers*.

E. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Maksud diadakan seminar internasional ini adalah untuk memberikan wawasan keilmuan bagi para peserta (kalangan akademisi dan praktisi) tentang perkembangan dinamika zakat di Asia Tenggara, khususnya pada kajian system pengelolaan zakat dan implementasi di masyarakat.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan seminar internasioanal adalah disamping menambah

wawasan keilmuan bagi peserta seminar, dan yang terpenting lagi dalam kegiatan tersebut adalah visi misi yang sama bagi pengelola zakat di Indonesia yang direspon positif oleh para peserta akademisi dan praktisi dari institusi peradilan agama.

F. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukuran

1. Indikator Keluaran

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah diharapkan adanya kesinambungan dari kerjasama antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lembaga pengelolaan zakat baik di Indonesia maupun di Negara dunia Islam. Kegiatan *International Seminar on Zakat* adalah ingin membangun sinergitas lembaga zakat dengan lembaga keuangan dan system pengelolaan zakat kontemporer baik di Indonesia maupun di Malaysia.

2. Volume dan Satuan Ukuran

Volume Kegiatan	Satuan Ukuran
Satu kali kegiatan /tahun	450 orang

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

- Ceramah/presentasi makalah
- Dialog/Tanya jawab

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan *International Seminar on Zakat* ini dilaksanakan berdasarkan hasil pembicaraan antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lembaga zakat, baik dari pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, lembaga zakat, maupun badan zakat, dan termasuk pula lembaga pengelolaan zakat di Malaysia. Masing-masing lembaga mengutus ahli-ahlinya untuk memberikan materi pada kegiatan *International Seminar on Zakat*. Selanjutnya Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengeluarkan SK panitia. Sejak keluarnya SK tersebut maka berkali-kali mengadakan rapat untuk menentukan jumlah peserta, termasuk dari unsur mana saja. Menentukan narasumber baik dari luar negeri maupun dalam negeri ditentukan oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

H. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan *International Seminar on Zakat* adalah Auditorium Rektorat lantai V Gedung Ir. Soekarno UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

I. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan seminar internasional ini dilaksanakan oleh panitia sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/KP.01.4/572/2015 tanggal 2 Juli 2015.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab dalam kegiatan ini adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Dr. Suwandi, M.H.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam *International Seminar on Zakat* ini adalah para akademisi; baik dosen maupun mahasiswa, praktisi; baik dari kalangan hakim Pengadilan Agama maupun praktisi pengelolaan zakat di Indonesia maupun Malaysia.

J. Jadwal Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu : 2 (dua) hari pada hari Senin – Selasa, tanggal 16 – 17 November 2015

2. Matrick Pelaksanaan Kegiatan

Waktu	Kegiatan
Senin, 16 November 2015	
Session I	
08.00-08.30	Opening Remarks – Rector UIN Maliki Malang <ul style="list-style-type: none">- Reading of Holy Qur'an- OC Progress – Dr. Roibin- Walikota Malang – H. Anton Opening Ceremony – Rector UIN Maliki Malang
08.30-12.00	Plenary Session I <ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi Perguruan Tinggi Islam sebagai Pusat Kajian Filantropi Islam- Pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Syariah Indonesia (ADSI) Oleh : Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, M.A. (Direktur Pendidikan Tinggi Islam)
12.30-13.00	Ishoma

13.00-16.00	Plennary Session I
	- Tantangan dan Peluang Pengembangan Zakat di Berbagai Belahan Dunia Presenter: Assoc. Prof. To'Puan Dr Nor Asiah Mohammad (International Islamic University Malaysia)
	- Optimalisasi Zakat dalam MEA Presenter: 1. Dr. Fakhruddin, M.HI 2. KH. Masdar Farid Mas'udi (BAZNAS RI)

16.00 – 16.15 Sholat Ashar & Coffe Break

16.15 – 17.30 Parallel Session:
Presentasi Call for Papers

Selasa, 17 Oktober 2015

08.30-11.30	Parallel Session II
	- Membangun Sinergitas Lembaga Zakat dengan Lembaga Keuangan Presenter: Dr. Agustianto Mingka, M.Ag (Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam)
	- Manajemen Mutu Lembaga Presenter: Hjordy Kashoogie Nazar, M.Sc. (Bank Indonesia)
	- Pengelolaan Zakat Berbasis Kamus Presenter: Dr. Sudirman, M.A. (UIN Maliki Malang)

11.30-12.30 Ishoma

12.30-15.30 Plannary Session III :

- Perkembangan Zakat Kontemporer di Malaysia
Presenter: Prof. Dr. Abdul Halim (UiTM Malaysia)
- Perkembangan Zakat Kontemporer di Indonesia
Presenter: Ahmad Juwaini (Presdir. Dompot Dhu'afa)

15.30-16.00

16.00-17.30

Sholat Ashar & Coffee Break

Forum Dekan Syariah/Hukum

Reformulasi Kurikulum Syariah untuk Memperluas Peluang Sarjana Hukum Islam sebagai Praktisi Hukum Tanpa Diskriminasi di Indonesia
Presenter: Dr. H. Roibin, M.HI.
(Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang)

K. Biaya Seminar

Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh terselenggaranya kegiatan *International Seminar on Zakat* ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2015 tanggal 14 November 2014.

RUNDOWN OF INTERNATIONAL SEMINAR ON ZAKAT

FAKULTAS SYARIAH UIN

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Tanggal 16 November 2015

[illegible]

13.30 – 15.00	Plennary Session II: <ul style="list-style-type: none"> Membangun Sinergitas Lembaga Zakat dengan Lembaga Keuangan Bank Zakat Nasional sebagai Solusi Keuangan Umat Pengelolaan Zakat Berbasis Kampus (Pengalaman di El-Zawa UIN Maliki Malang) 	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Agustianto Mingka, M.Ag. (Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Ricky Satria, M.B.A. (Bank Indonesia) Dr. Sudirman, M.A (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 	Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.
15.00 – 16.30	Plennary Session III: <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Zakat Kontemporer di Malaysia Perkembangan Zakat Kontemporer di Indonesia Manajemen Mutu Lembaga Zakat 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. Abdul Halim (UiTM Malaysia) Dr. Ahmad Juwaini, M.M. (Presdir. Dompot Dhuafa) Dr. Fakhruddin, M.HI (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 	Dr. H. Moh. Toriquddin, M.HI
16.30 – 17.45	Sholat Ashar, Coffee Break & Sholat Maghrib		
17.45 – 19.15	Parallel Session: Presentasi Call for Papers	Penulis Calls For Papers	Dra. Jundiani, M.Hum
19.15 - 19.30	Penutupan		Dr. Sudirman, M.A

KESADARAN HUKUM ZAKAT DALAM KONSTITUSI NEGARA

Dr. Suwandi, MH.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

Zakat sebagai instrument perekonomian, melibatkan setidaknya dua komponen pada strata sosial ekonomi dalam masyarakat. Zakat as an economic instrument, involving at least two components of the socio-economic strata of society. Kedua komponen tersebut adalah muzakki dan mustahiq. Muzakki adalah mereka yang memiliki surplus keuangan, sedangkan mustahiq adalah pihak yang mengalami devisa keuangan. Both of these components are muzakki and mustahiq. Muzakki are those who have a financial surplus, while mustahiq are those experiencing financial deficit. Zakat bertujuan memberikan pertolongan kepada mustahiq, dengan cara mengambil sebagian dari harta muzakki sesuai ketentuan yang berlaku untuk diberikan kepada mustahiq. Zakat aims to provide aid to mustahiq, by taking wealth of muzakki in accordance with the applicable rule to be given to mustahiq. In certain circumstances, the implementation of the management of zakat can use the help of a third party called amyl.

Pada awalnya zakat merupakan bagian agama dalam kedudukannya sebagai rukun Islam. At first, zakat is an obligation in Islam, in its capacity as the pillars of Islam. Therefore, in the context of religion, people who do not issue zakat and already meets the requirements is considered a sin. Similarly, in terms of the constitution of the state, arguing that zakat has a strong on legal basis, namely 1945 Constitution and the Law No. 23 year 2011 on Zakat Management, and Government Regulation. No. 14 year 2014 on the Implementation of Law No. 23 Year 2011 on Zakat Management.

Persoalan yang tersisa adalah lemahnya pelaksanaan zakat tersebut, padahal regulasinya dari dua perspektif sebagaimana disebutkan di atas sudah jelas dan masuk akal. The remaining issue is the weak implementation of zakat, whereas the regulations from two perspectives mentioned above are clear and reasonable. Artinya ada kelemahan kesadaran hukum masyarakat Islam itu sendiri dalam permasalahan zakat. It means that there is a weakness of public awareness of Islam itself in zakat issues. Untuk itu perlu diadakan gerakan penyadaran hukum tentang zakat yang harus difasilitasi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki otoritas dalam konteks Negara. It is necessary for the movement of legal awareness of zakat which should be facilitated by the government, because the government who has the authority in the context of the state.

A. Pendahuluan

Kajian tentang sejarah kehidupan manusia sering dikaitkan dengan persoalan ekonomi. Ekonomi merupakan tolok ukur yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan apakah seseorang atau kelompok dikatakan sejahtera atau tidak. Bahkan dalam konteks negarapun perekonomian selalu dijadikan ukuran yang paling dominan apakah sebuah Negara dikatakan makmur dan sejahtera. Yang demikian itu karena hidup sejahtera merupakan harapan semua orang, baik dalam konteks individu, kelompok, maupun Negara. Berbagai instrumen perekonomian menjadi fokus kajian ataupun secara implementatif langsung dijadikan obyeknya. Zakat sebagai salah satu instrumen dari sekian banyak instrumen perekonomian selalu dianggap aktual untuk dikaji dalam rangka mencari performa atau bentuk teknis yang handal dan dapat dijadikan solusi menyelesaikan ketimpangan sosial dalam bidang perekonomian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Peranan zakat dalam kesertaannya menyelesaikan persoalan kemiskinan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Zakat selalu tampil di tengah kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kajian maupun peranannya secara langsung menggerakkan mereka yang memiliki surplus keuangan atau harta tertentu untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Marak dan populernya zakat sebagai instrumen perekonomian untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan tidak sejahtera, ditopang dengan dua hal. *Pertama*, zakat merupakan bagian penting ajaran agama Islam yang diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta dengan kadar tertentu (*nishab*) yang harus dikeluarkan sebagiannya dengan kadar tertentu pula untuk disalurkan (diberikan) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Kedua, secara hukum zakat merupakan instrumen perekonomian Negara yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan tersebut mulai dari yang bersifat konstitutif maupun regulative. Konstitusi Indonesia tentang zakat berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial khususnya Pasal 33 dan Pasal 34. Selain itu pemerintah juga sudah menerbitkan sekian banyak aturan perundang-undangan tentang zakat yang antara lain adalah Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 14, Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomer 23, Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.

Sekalipun berbagai regulasi baik dari perspektif agama maupun Negara sebagaimana disebutkan di atas sudah ada dan legitimet sebagai aturan, tetapi faktanya pelaksanaan zakat hingga saat ini masih terkesan tidak optimal. Ketidakefektifan implementasi zakat tersebut bisa dilihat dari sudut pandang banyaknya kemiskinan di Indonesia. Dunia ini secara *sunnatullah* memang didesain sedemikian rupa,

yang terdiri dari orang miskin dan orang kaya. Kemiskinan dengan demikian tidak mungkin bisa dihilangkan walaupun dengan berbagai macam cara dilakukan. Akan tetapi apabila zakat di Indonesia dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, setidaknya kemiskinan akan selalu berkurang setiap tahunnya. Persoalan kepatuhan dan kesadaran terhadap pelaksanaan agama dan aturan perundang-undangan tampak belum bisa dijadikan andalan dalam pelaksanaan zakat di Indonesia. Padahal, agama dengan ajarannya yang meletakkan pengeluaran zakat sebagai kewajiban bagi yang memiliki kemampuan dan mendapatkan dosa besar (siksa) bagi pembangkangnya, serta undang-undang Negara yang begitu jelas memberikan payung hukum sebagai landasan pengelolaan zakat. Secara ringkas persoalan yang melilit dan sulit diurai perihal pelaksanaan dan pengelolaan zakat bukanlah terletak pada aturan atau regulasinya, tetapi kesadaran masyarakat itulah yang sesungguhnya menjadi biangnya. Tidak dipungkiri, kesadaran masyarakat memang ada, tetapi kesadaran membayar atau mengeluarkan zakat yang hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat berpunya itu belumlah secara signifikan mewakili kesempurnaan yang diharapkan. Sering kali mereka mengeluarkan zakat dalam jumlah besar tetapi secara manajerial tidak diatur secara baik yang hasilnya justru melahirkan sesuatu yang kontra produktif. Maksudnya dengan mengeluarkan zakat tersebut tujuannya untuk membantu masyarakat miskin, tetapi yang terjadi justru sebaliknya pembagian zakat sering kali menimbulkan masalah baru berupa kematian si miskin akibat tidak bagusnya manajerial yang dijalankan oleh si *muzakki*. Hal ini sangat jelas karena unsur *amil* yang mestinya harus dilibatkan dalam pengelolaan zakat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kesadaran untuk menggunakan jasa *amil* nampaknya masih dibayangkan oleh ketidakpercayaan *muzakki* terhadap *amil* itu sendiri. Padahal dalam situasi seperti Indonesia saat ini di mana para *mustahiq* begitu banyak dan tidak mungkin bisa dilayani hanya dengan sedikit personil dan buruknya manajerial, hampir bisa dipastikan tidak akan dapat memberikan pelayanan dan hasil yang baik sesuai yang diharapkan.

Menelisik pemaparan di atas, maka yang menjadi persoalan sentral dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah terletak pada kesadaran ketiga komponen penting dalam zakat. Ketiga komponen tersebut adalah *muzakki* sebagai orang yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, *mustahiq* sebagai yang menerima zakat yang dituntut bersabar dan tertib, serta *amil* sebagai pengelola yang mestinya menunjukkan profesionalitas dan prestasinya dalam mengelola zakat hingga mendapatkan kepercayaan dari *muzakki* maupun *mustahiq*. Untuk itulah kajian ini diberi tema tentang kesadaran hukum zakat dalam konstitusi negara, dengan harapan zakat di kemudian hari akan muncul sesuai fungsinya mengeluarkan sebagian harta dari mereka yang memiliki *surplus* keuangan atau harta untuk meringankan beban

ekonomi, bahkan bila perlu menjadikan mereka yang mengalami devisa keuangan menjadi kaya di kemudian hari.

B. Zakat sebagai Instrument Kesejahteraan Umat.

Islam sebagai agama samawi yang terakhir, memiliki ajaran yang sangat lengkap dan universal. Dikatakan lengkap karena Islam mencakup segala hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan secara menyeluruh. Tidak satu aspekpun dalam kehidupan ini yang tidak tersentuh oleh ajaran Islam. Kelengkapan ajaran Islam tersebut secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua jalur, yaitu jalur vertikal sebagai hubungan manusia dengan Allah SWT, dan jalur horisontal sebagai wujud hubungan manusia dengan lainnya yang disebut dengan muamalah. Hubungan vertikal sebagai wujud pengabdian kepada Allah dalam bentuk ibadah murni seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, maupun bentuk-bentuk ibadah lain yang biasanya disebut sebagai ibadah *ghairu mahdhah* (tidak murni). Sedangkan hubungan horisontal adalah hubungan manusia dengan lainnya yang disebut muamalah. Adapun yang dimaksudkan dengan universalitas ajaran Islam biasanya berkaitan dengan persoalan muamalah yang dalam banyak hal tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, melainkan juga untuk seluruh alam semesta. Itulah sebabnya Islam dinamakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (agama Islam sebagai rahmat bagi alam semesta).

Zakat sebagai salah instrument perekonomian umat memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan problem kemiskinan atau ketidaksejahteraan umat baik dalam lingkup individu, kelompok maupun masyarakat luas seperti rakyat dalam kontek Negara. Zakat bersumber dari harta kekayaan orang kaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan orang miskin atau lainnya (sesuai *ashnaf* atau golongan yang boleh menerima zakat). Pengertian zakat bukan hanya merupakan perpindahan harta orang kaya kepada orang miskin saja, melainkan perpindahan yang didasari sebagai kewajiban si kaya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, yang masuk dalam katagori rukun atau tiang agama. Artinya apabila orang kaya yang hartanya sudah mencapai *nishab* dan tidak mengularkan zakatnya, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar, karena termasuk mengkonsumsi harta orang miskin atau fakir. Untuk itulah Allah SWT dalam firmanNya QS. Al-Taubah 103, menyatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu) menjadi (ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Begitu pula hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomer hadits 1331 menyatakan:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)
"beritahukanlah kepada mereka) wahai Muhammad (bahwa Allah SWT mewajibkan mereka shodaqah) zakat (yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan) disalurkan (kepada orang-orang fakir di antara mereka."

C. Zakat dalam Konstitusi Indonesia

Menelisik pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, zakat mempunyai kekuatan yuridis yang sangat kokoh, baik berdasarkan al-Qur'an maupun al-Hadits. Berdasarkan dasar hukum tersebut semestinya zakat berjalan secara efektif dan bisa menjadi solusi penyelesaian kesenjangan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan masalah perkonomian. Tidak dipungkiri bahwa zakat sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Artinya secara teoritis ataupun akademis, zakat sudah dipahami oleh seluruh umat Islam dari berbagai lapisan, yaitu para wajib zakat yang dikenal dengan sebutan *mustahiq* bahkan professional yang memiliki kemampuan sebagai *amil* zakat. Artinya permasalahan zakat ini sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik *muzakki* sebagai orang berkewajiban mengeluarkan zakat, *mustahiq* sebagai orang yang berhak menerima zakat, maupun *amil* sebagai professional yang mengelola zakat. Ringkasnya zakat sudah menjadi jiwa masyarakat yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupannya. Dalam posisinya sebagai jiwa masyarakat, menurut madzhab sejarah, zakat sudah bisa dibilang masuk katagori hukum Negara yang harus ditaati oleh seluruh subyek hukum di kalangan masyarakat Islam. Karena dalam pemikiran madzhab sejarah ini, hakekat hukum itu sesungguhnya perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik². Frederich Karl Von Savigny (sebagai pelopor madzhab sejarah) menyatakan "hukum tidak ditetapkan/dibuat oleh pemerintah (pihak penguasa atau otoritas) tetapi tumbuh sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang analog dengan perkembangan kebudayaan, bahasa, dan adat-istiadat masyarakat."³ Berdasarkan pernyataan Savigny ini zakat dalam kerangka hukum Islam atau fikih muamalah sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, sekalipun dalam kontek Negara belum demikian. Hanya saja kekuatan mengikatnya hukum zakat tersebut

1 Abi Abdillah Muhamad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, Juz awal, (Bandung Indonesia: Syirkah al-Ma'arif), hal. 242..

2 I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press), hal. 13.

3 I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, hal.13.

masih bersifat kesadaran internal peserta hukumnya (umat Islam), karena memang hukum itu selama belum menjadi hukum Negara (dalam konteks positivisme hukum) belumlah memiliki kekuatan mengikat dan tidak bisa pula dipaksakan.

Berbeda dari hukum Islam atau fikih muamalah, hukum positif atau perundang-undangan tertulis. Seluruh ketentuan hukum dalam perspektif hukum positif itu baru dapat dikatakan memiliki kekuatan mengikat bahkan dapat dipaksakan apabila sudah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan apapun dalam kerangka positivisme hukum secara hirarki harus bersumber dari hukum dasar. Hukum dasar ini dalam konteks Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian merupakan hukum tertinggi yang menjiwai aturan-aturan perundang-undangan dibawahnya. Hukum zakat sebagai bagian dari hukum ekonomi, bila dikaitkan dengan konstitusi Negara haruslah memiliki kaitan (bergantung) pada hukum dasar tersebut (yaitu Pancasila dan UUD 1945), tepatnya sila kelima dari Pancasila dan Pasal 33 dan 34 dari UUD 1945. pengertian demikian ini terkadang dimaknai kebablas oleh sebagian pemerhati hukum ekonomi dan menyatakan sebagai hukum ekonomi Pancasila. Maksudnya memang tidaklah berlebihan. Tetapi sesungguhnya cetak biru hukum ekonomi Pancasila yang dimaksudkan hingga saat ini belumlah ada kenyataannya. Akhirnya yang terkesan perujukan Pasal 33 atau Pasal 34 (UUD 1945) dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan perekonomian hanya bersifat *formalistis* atau *performa*⁴.

Upaya mengaitkan kajian zakat dengan ekonomi memang merupakan suatu keharusan, karena zakat merupakan satu aspek dari sekian aspek ekonomi yang ada. Yang demikian ini perlu dilakukan terutama apabila zakat ingin dibawa dalam konteks Negara. Tetapi yang lebih penting lagi adalah membedakan zakat sebagai bagian dari ekonomi dan hukum zakat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Karena ilmu ekonomi atau *economics* harus dibedakan dari *economic policy*. *Economics* sebagai ilmu pengetahuan bersifat universal, sedangkan *economic policy* merupakan penerapan ilmu ekonomi di suatu tempat dan suatu waktu tertentu.⁵ Dengan demikian zakat sebagai cabang dari ekonomi kapasitasnya sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Sedangkan apabila dikaitkan dngan *economic policy* zakat berarti penerapan zakat yang terikat dengan suatu ruang dan waktu tertentu. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan konteks Indonesia berarti zakat yang secara mekanistik diatur berdasarkan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang darinya diturunkan dalam bentuk undang-undang ataupun aturan perundang-undangan lainnya.

4 Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas), hal. VIII.

5 Jimly Asshiddiqie, 2010, hal. VIII.

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi biasanya berpijak dari pengalaman yang sudah berlalu yang dalam ilmu politik biasa disebut *basic policy*, yaitu alasan mengapa suatu undang-undang itu dikeluarkan sebagai kebijakan oleh pemerintah. Dari *basic policy* ini apabila dalam kenyataannya implementasi isi atau substansi undang-undangnya dipandang kurang signifikan karena faktor eksternal (seperti karena perkembangan sosial yang terlalu cepat, implementasinya sulit, atau alasan lainnya), maka muncullah apa yang dinamakan *enachmen policy*, yaitu perubahan suatu undang-undang yang dikarenakan adanya faktor lain yang menyebabkan undang-undang tersebut harus berubah. Dengan kata lain undang-undang itu harus berubah karena adanya faktor pengubah. Perubahan undang-undang atau aturan hukum seperti ini juga terjadi pada kerangka hukum Islam, sebagaimana kaedah fikih yang menyatakan: *تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة* (Hukum itu bisa berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat).

Persoalan yang paling mendasar dalam kaitannya dengan hukum zakat adalah tidak mungkin dilakukannya perubahan zakat dari sudut pandang substansinya. Substansi hukum zakat merupakan sesuatu yang baku dan tidak mengenal amandemen. Tidak mengenalnya amandemen hukum zakat tersebut karena hukum zakat bukanlah buatan manusia melainkan buatan Allah sebagai otoritas tunggal. Kemungkinan bisa berubahnya hukum zakat hanya terletak pada mekanisme pelaksanaannya ataupun keterkaitan zakat dengan lembaga dan kebudayaan hukum zakat. Ditinjau dari sudut pandang lembaga hukum dan budaya hukumnya, atau mekanisme implementasinya inilah zakat memang harus mengalami perubahan. Hal ini karena keterkaitan zakat dengan persoalan kebijakan Negara yang memiliki otoritas dalam hal implementasinya. Kebijakan Negara yang selanjutnya dinamakan konstitusi diartikan sebagai perjanjian *consensus* atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara⁶. Perlu dibedakan zakat sebagai pengamalan agama dan zakat sebagai kegiatan bernegara sekalipun sumber zakat berasal dari nomenklatur agama. Kebijakan zakat yang berupa derivasi konstitusi ekonomi pasti melahirkan permasalahan apabila tidak secara rinci diatur dalam aturan tertentu yang mengakibatkan tidak efektifnya implementasi zakat itu sendiri. Kebijakan demikian biasanya terjadi pada pemerintahan otoriter yang tidak menyediakan uji konstitusional tidaknya produk-produk kebijakan yang dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Ironisnya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan tentang zakat yang dalam kenyatannya tidak atau belum sepenuhnya ditaati oleh subyek hukum zakat (*muzakki*, *mustahiq*, dan *amil*). Padahal Indonesia bukanlah Negara otoriter. Di sini menimbulkan suatu pertanyaan ada apa sesungguhnya dengan masalah zakat di Indonesia, hingga terjadi kurang adanya kesadaran hukum tentang zakat, baik dalam aspek mengeluarkannya, ataupun pelaksanaannya.

6 Jimly Asshiddiqie, 2010, hal. IX.

D. Kesadaran Hukum Para Pelaku Zakat

Sebelum membahas kesadaran hukum, terlebih dahulu dipaparkan tentang siapa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pelaku zakat. Pada pokoknya pelaku zakat terdiri dari *muzakki* sebagai orang yang berzakat, dan *mustahiq* sebagai orang yang menerima zakat. Akan tetapi ditinjau dari segi pelaksanaannya ada pihak ketiga yang secara mekanis memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mereka adalah *amil* zakat. Dasar hukum *amil* zakat ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Taubah ayat (60):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
نِزْةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Yang dimaksudkan dengan *al-amilin* pada ayat di atas adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Musthofa Dib al-Bigha dalam kitab *Al-Tadzhib Fi Adillati Matni al-Ghayah wa al-Taqrīb* yang berbunyi: *العاملين عليها: هم من يستعين بهم الإمام لجمع الزكاة وتوزيعها* (Para *amil* adalah mereka yang dimintai tolong) diangkat (oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya). Hal yang penting untuk dijadikan perhatian di sini adalah bahwa *amil* adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (bukan kemauan sendiri). Karena *amil* yang diangkat oleh pemerintah itu memiliki daya memaksa atas nama pemerintah untuk menarik zakat dari mereka yang memiliki harta zakat sesuai *nishab* yang telah ditentukan. Mentaati *amil* selaku kepanjangan tangan pemerintah dengan demikian merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar karena dua alasan. *Pertama*, karena imam atau pemerintah itu diangkat untuk menjaga agama memberikan kecukupan kepada masyarakat. Ini selaras dengan pernyataan Muhammad Al-Khadhiri Bik: *وظيفة الإمام لحراسة الدين وكفاية الأمة*⁷ (tugas pemerintah adalah untuk menjaga agama dan memberikan kecukupan kepada rakyat). Begitu juga Imam Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Deddy Ismatullah berpandangan *"bahwa kepala Negara (imamah) dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Ini artinya seorang kepala Negara*

7 Musthofa Dib al-Bigha, 1978, *Al-Tadzhib Fi Adillati Matni al-Ghayah wa al-Taqrīb*, (Jombang: Al-Haj Abdul Aziz Masyhuri), hal. 98.

8 Muhammad Al-Khadhiri Bik, *Itmam al-Wafa' Fi Siyarah al-Khulafa'*, (Jedah: Sangkapurah), hal. 16.

adalah pemimpin agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain.⁹ Kedua, penegasan Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat (59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Berdasarkan dua alasan di atas, maka andaikan zakat tersebut masih berada dalam perspektif agama, asalkan ada *amil* yang diangkat oleh pemerintah maka hukumnya wajib ditaati oleh seluruh pelaku zakat. Terlebih bila masalah zakat itu sudah diatur oleh pemerintah dalam bentuk aturan perundang-undangan. Artinya bila zakat masih belum mendapatkan perhatian oleh seluruh pelaku zakat maka yang menjadi persoalan adalah kesadaran hukumnya.

Paham tentang kesadaran hukum sesungguhnya kembali kepada warga masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat tentang hukum pada awalnya berasal dari substansi hukumnya, baik dalam kaitannya dengan substansi hukum, lembaga hukum, maupun budaya hukumnya. Menurut G.E. Langemeijer sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* yang intinya adalah, bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.¹⁰ Pernyataan G.E. Langemeijer ini sesungguhnya ingin mengatakan bahwa hukum itu memiliki kekuatan bukan karena Negara yang menghendaknya, tetapi memang hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh Negara itu sesuai dengan kesadaran dan perasaan hukum masyarakatnya. Ini sejalan dengan pendapat Krabbe yang mengatakan bahwa hukum mengikat bukan karena Negara menghendaknya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu.¹¹ Pada kesempatan yang lain Krabbe juga mengatakan hal yang senada, yaitu bahwa selain dari pada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik,

⁹ Deddy Ismatullah dkk, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 41.

¹⁰ G.E. Langemeijer dalam Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Suatu Percobaan metode empiris untuk mengukur kesadaran huku dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas), (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 145.

¹¹ Krabbe dalam Lili Rasjidi dkk, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal.84.

maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar dari pada wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. Kenyataan tersebut semakin berkembang, terutama dalam kehidupan spiritual manusia dewasa ini.¹² Bertitik tolak dari pendapat-pendapat di atas, pada intinya pembentukan hukum itu harus didasarkan pada tata kelakuan (= *moris*) yang ada agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut.¹³ Dengan kata lain pembentukan hukum harus cocok dengan kesadaran dan perasan hukum masyarakat dengan harapan lahirnya sebuah produk hukum mudah diterima oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku dan diimplementasikan sebagaimana mestinya. Apabila tidak demikian maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah kontradiksi atau pengabaian terhadap ketetapan hukum tersebut.

Peranan pemerintah untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan sebagai wujud kebijaksanaan pemerintah terhadap rakyatnya.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁴ (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya dengan memandang kemaslahatannya). Pemerataan kesejahteraan umat melalui zakat dengan demikian merupakan hal yang terpuji baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

E. Kesimpulan.

Zakat sebagai instrument perekonomian yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang kurang sejahtera memang berasal dari nomenklatur agama Islam yang seharusnya ditaati oleh seluruh para subyek hukum zakat. Namun demikian berdasarkan pendapat para pakar sekalipun hukum zakat masih berada dalam tataran hukum Islam, mestinya para subyek hukum zakat harus mentaatinya sebagai bentuk kesadaran hukumnya. Karena baik secara normative maupun empiris zakat tersebut dikelola oleh amil sebagai kepanjangan tangan kekuasaan pemerintah. Apa lagi dalam kenyataannya aturan perundang-undangan tentang zakat, mulai dari hukum dasar sampai peraturan derivasinya sudah tersedia. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggalakkan zakat merupakan kewajiban dalam rangka memberikan kesejahteraan umat secara merata.

12 Krabbe dalam Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* hal. 145.

13 Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, hal. 146.

14 Athiyyah Abdullah Athiyyah Ramadlan, 2007, *Mausu'ah Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman), hal 106.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an .

Athiyyah Abdullah Athiyyah Ramadlan, 2007, *Mausu'ah Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman).

Abi Abdillah Muhamad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, Juz awal, (Bandung Indonesia: Syirkah al-Ma'arif).

Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press).

Deddy Ismatullah dkk, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, hal.13.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas), ,hal. VIII.

Lili Rasjidi dkk, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Musthofa Dib al-Bigha, 1978, *Al-Tadzhib Fi Adillati Matni al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Jombang: Al-Haj Abdul Aziz Masyhuri)

Muhammad Al-Khadhiri Bik, *Itmam al-Wafa' Fi Siyarah al-Khulafa'*, (Jedah: Sangkapurah).

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Suatu Percobaan metode yuridis empiris untuk mengukur kesadaran huku dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas), (Jakarta: CV. Rajawali).

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* hal. 145.

UUD 1943

Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

IMPLEMENTATION OF SEMINAR

A. Tahapan persiapan

1. Rapat-rapat

Kegiatan rapat yang diagendakan panitia sangat diperlukan dalam membicarakan hal teknis terkait dengan pelaksanaan *International Seminar on Zakat* demi kesuksesan dan kelancaran kegiatan tersebut. Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh panitia adalah rapat koordinasi awal untuk menentukan waktu pelaksanaan seminar. Kemudian rapat-rapat kecil yang dilakukan oleh setiap seksi untuk membicarakan tupoksi masing-masing, dan rapat persiapan akhir pelaksanaan dengan melakukan pengecekan terhadap ruang seminar, presensi peserta, lembar monitoring, curriculum vitae, dan sarana prasarana lain yang dapat menunjang dalam proses seminar.

Adapun agenda dan hasil rapat panitia sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Hasil Rapat
1.	Senin, 5 Oktober 2015	
	Sosialisasi kegiatan oleh Dekan Fakultas Syariah	Dr. H. Roibin, M.Ag., menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya <i>International Seminar on Zakat</i> dengan maksud kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat di Indonesia dan Malaysia, dan didukung oleh Badan Zakat Nasional.
	Pembagian Job description Panitia	Ketua panitia membagi pekerjaan masing-masing seksi sesuai dengan tupoksinya.
	Publikasi kegiatan	Publikasi <i>International Seminar on Zakat</i> menggunakan media papan pengumuman, website Fak. Syariah, baliho, spanduk dan undangan yang dikirim kepada peserta dan lembaga
	Penentuan waktu pelaksanaan	Waktu pelaksanaannya hari Senin – Selasa, tanggal 16 – 17 November 2015
2	Kamis, 22 November 2015	

Penentuan Jumlah Peserta	Jumlah peserta yang ditetapkan adalah 450 orang
Penetapan Narasumber	Narasumber dalam <i>International Seminar on Zakat</i> ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA. (Direktur Pendidikan Tinggi Islam) - Assoc. Prof. To'Puan Dr. Nor Asiah (International Islamic University Malaysia) - KH. Masdar F. Mas'udi, M.A. (BAZNAS) - Dr. Agustianto Mingka, M.Ag (Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam) - Jhordy Kashoogie Nazar, M.Sc. (Bank Indonesia) - Ricky Satria, M.BA (Bank Indonesia) - Prof. Dr. Abdul Halim (UiTM Malaysia) - Dr. Ahmad Juwaini (Presdir. Dompot Dhu'afa) - Dr. Roibin, M.HI. (Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang) - Dr. Fakhruddin, M.HI. (Pakar Zakat UIN Maliki Malang) - Dr. Sudirman, M.A. (Kajur Al Ahwal Al Syakhshiyah)

3 Jum'at,
6 November
2015

Laporan jumlah peserta	Jumlah peserta yang positif hadir adalah 450 orang, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi
Persiapan sarana dan prasarana	Panitia, cq. Seksi Pembantu Umum menyiapkan tempat pelatihan dan sarana penunjang lainnya.

2. Publikasi dan Sosialisasi kegiatan

Publikasi dan sosialisasi kegiatan *International Seminar on Zakat* ini dilakukan melalui beberapa media berikut:

- Pemberitahuan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah pada Forum Dekan se-Indonesia
- Publikasi dan sosialisasi dilakukan dengan brosur/pamphlet yang ditempel di papan pengumuman fakultas.

- c. Publikasi dan sosialisasi dilakukan melalui media internet (website fakultas).
- d. Publikasi dan sosialisasi melalui baliho, spanduk, dan surat yang dikirim kepada instansi pendidikan (Fakultas Hukum di Malang Raya, Fakultas Syariah se-Indonesia, Pengadilan Agama se-Jawa Timur).

3. Penyebaran Schedule Kegiatan

Setelah dihasilkan penentuan waktu pelaksanaan, narasumber dan peserta yang akan di undang, maka panitia menyusun jadwal dan surat permohonan kepada narasumber dan surat kesediaan menjadi peserta kepada dosen dan mahasiswa pascasarjana UIN Maliki Malang, serta para hakim Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur.

B. Pelaksanaan Seminar

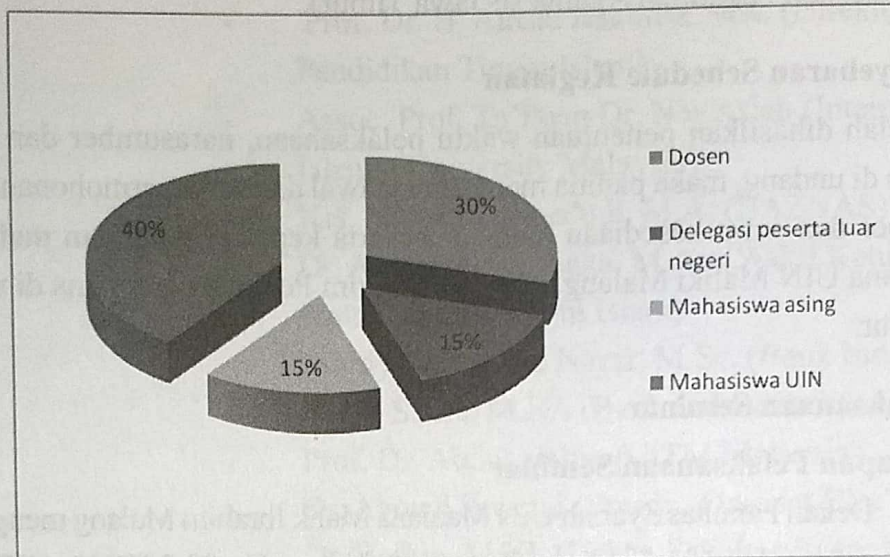
1. Tahapan Pelaksanaan Seminar

- a. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengangkat panitia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Un.03.2/KP.01.4/572/2015 tentang pembentukan Panitia penyelenggara dan *International Seminar on Zakat* bertema *Strengthening Zakat For Socio Economic Development*.
- b. Panitia mengadakan rapat koordinasi, untuk mendengarkan penjelasan dari Dekan Fakultas Syariah tentang tujuan, sasaran yang dicapai dalam kegiatan dimaksud.
- c. Penanggung Jawab kegiatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dr. Suwandi, M.H. memberikan waktu sepenuhnya kepada ketua panitia untuk membahas mekanisme job masing-masing seksi dalam kepanitiaan.
- d. Sosialisasi dan publikasi *International Seminar on Zakat*
- e. Setelah panitia memastikan narasumber dalam kegiatan tersebut, maka panitia membuat surat permohonan menjadi narasumber.
- f. Panitia mengadakan rapat evaluasi persiapan, berikut validasi jumlah peserta yang mendaftar.
- g. Panitia menggandakan makalah, dan mempersiapkan tempat pelaksanaan dan sarana penunjang lainnya.

2. Peserta *International Seminar on Zakat*

Peserta *International Seminar on Zakat* adalah dosen dari beberapa Perguruan Tinggi Islam, maupun umum, negeri maupun swasta, para praktisi dari lembaga peradilan agama se-Jawa Timur, dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ketua unit/lembaga UIN Maliki Malang, para dekan di

lingkungan UIN Maliki Malang, mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki Malang, delegasi dari 31 Perguruan Tinggi Islam (UIN, IAIN, dan STAIN) yang tergabung dalam Forum Dekan Syariah dan Hukum. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



3. *International Seminar on Zakat*

Pembukaan *International Seminar on Zakat* di buka secara resmi oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.) dan sekaligus memberikan sambutan. Sebelum sambutan rektor. Ada beberapa rangkaian kegiatan open ceremoni, yaitu pembacaan ayat suci al-Qur'an, sambutan dari Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Dr. H. Roibin, M.H.I), Dr. Roibin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta seminar, dan khususnya kepada peserta dari 40 Perguruan Tinggi dan rekan-rekan praktisi dari lembaga peradilan agama se-Jawa Timur, kepada pengelola zakat, Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat dan ucapan terima kasih disampaikan kepada UiTM Malaysia yang telah hadir pada kegiatan *International Seminar on Zakat*. Selanjutnya dekan juga berharap dengan kegiatan ini Fakultas Syariah UIN Maliki Malang bersama-sama dengan Perguruan Tinggi Islam lain menindaklanjuti kegiatan ini pada level-level internasional yang lebih luas lagi. Dr. H. Roibin, M.HI. berharap semoga hasil kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan *microfinance* Islam di dunia.

Kemudian sambutan dari Walikota Malang, yang diwakili oleh Wakil Walikota Malang Bapak Sutiaji, dalam sambutannya merasa bangga dan terharu dengan sukses acara ini dan hadirnya para ahli zakat dari dua Negara. Kemudian dengan terharunya Bapak Sutiaji berharap akan kesuksesan *International Seminar on Zakat* ini, UIN Maliki Malang akan diberikan kepercayaan lagi untuk melaksanakan kegiatan

yang lebih besar lagi, yaitu kegiatan yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan ditutup oleh Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla yang melibatkan seluruh ulama dan cendekiawan muslim sedunia. Harapannya harapan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Malang melalui Zakat. Sehingga dapat mensinergi program-program pemerintah salah satunya adalah menghapus kemiskinan yang semakin tinggi di Indonesia

Kemudian sambutan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus membuka acara *International Seminar on Zakat*. Dalam sambutannya Rektor menyampaikan ucapan terima kasih kepada rombongan dari Malaysia yang telah memberikan kepercayaan kepada UIN Maliki Malang, dapat menghadiri kegiatan *International Seminar on Zakat*. dan ucapan terima kasih pula kepada Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Syariah dari Perguruan Tinggi Negeri Islam, telah membuat UIN Maliki Malang dari kampus Islam yang tidak diperhitungkan menjadi salah satu kampus Islam terbaik dan terbesar di Indonesia. Selanjutnya Prof. Mudji menyampaikan saat ini UIN Maliki Malang telah memiliki mahasiswa dari 32 negara, sehingga siap untuk berkompetisi di tingkat Internasional, dan selanjutnya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membuka acar dengan resmi.

Acara selanjutnya adalah Do'a yang dipimpin oleh Dr. Suwandi, M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

a. Plennary Session I

Presenter: Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, M.A.

(Direktur Pendidikan Tinggi Islam)

Prof. Amsal menyampaikan materi dengan tema: "Optimalisasi Perguruan Tinggi Islam sebagai Pusat Kajian Filantropi Islam". dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa awal momentum perkembangan filantropi Islam dimulai tahun 1990an, hingga saat ini pertumbuhan filantropi Islam (lembaga-lembaga amil zakat, infaq, sedekah dan wakaf) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Di antara lembaga zakat yang cukup dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. Besarnya jumlah kaum muslim menjadikan Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid terbanyak didunia yakni mencapai 800.000 masjid. Dengan demikian, potensi jumlah dana terhimpun pada masjid sangat besar. 1 Tetapi sangat disayangkan, dimana ada masjid justru disitulah potret kemiskinan terlihat dengan nyata. Misalnya saja, di Masjid Istiqlal yang konon merupakan masjid kebanggaan, tetapi disekitar masjid bertaburan pengemis. Maka dapat dikatakan, masjid "telah gagal" dalam melakukan pengelolaan zakat, khususnya dalam hal distribusi dana zakat.

Perkembangan lembaga zakat dan wakaf perlu diarahkan menuju kesadaran keagamaan untuk menanggulangi masalah sosial secara temporer dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Saat ini, orientasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru pada tahap konformisme, yaitu ketaatan akan perintah Tuhan dan kecintaan pada manusia karena ajaran agama. Karena itu, walaupun 500-an lembaga zakat telah berdiri di Indonesia, namun pengaruhnya pada pengembangan masyarakat belum terlihat secara signifikan.

Faktor kepercayaan masyarakat dan kapasitas lembaga zakat menjadi permasalahan umum lembaga-lembaga zakat. Reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat. Selain itu, idealnya pengembangan manajemen zakat diarahkan pada peningkatan kemampuan menghimpun sumber dana zakat, pengelolaan sumber dana zakat dan manajemen pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan para asnaf dan mengangkat ummat dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju ummat yang berdaya dan sejahtera. Gerakan zakat dituntut mengembangkan diri untuk mengeluarkan gagasan pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus utama wacana zakat kontemporer. Gagasan pendayagunaan zakat diharapkan pula menjadi arus utama dalam strategi pengentasan kemiskinan diberbagai wilayah dunia.

Karena itu, jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kelemahannya adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberi ikan tapi tidak memberi pancing (kail). Berbeda dengan bentuk filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*), bentuk filantropi seperti ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Diantara lembaga filantropi yang menarapkan metode tersebut diantaranya adalah Yayasan Dompot Dhu'afa dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

b. *Plennary Session II*

- 1) Assoc. Prof. To' Puan Dr. Nor Asiah Mohamad (International Islamic University Malaysia)

Prof. Asiah menyampaikan materi dengan tema: "Tantangan dan Peluang Pengembangan Zakat di Berbagai Belahan Dunia". Dalam orasi ilmiahnya menyampaikan Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā') untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā' untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.

Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran strategis daripada zakat bagi masyarakat itu antara lain sebagai berikut: (1) Capital, menurut penelitian yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy) bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 19–20 triliun per tahun, sebuah modal yang cukup bagi pembangunan masyarakat, dan jumlah itu akan semakin besar seiring meningkatnya kesadaran umat Islam tentang zakat dan kemampuan fiqh untuk mendeskripsikan jenis-jenis usaha/penghasilan baru yang dimasukkan sebagai objek zakat; (2) Social Justice, pelaksanaan zakat membangkitkan keadilan sosial di tengah masyarakat, disamping karena munculnya sumber-sumber penerimaan zakat dari jenis-jenis penghasilan baru juga karena zakat diberdayakan untuk kepentingan fakir-miskin yang ditunaikan oleh orang-orang kaya di tengah-tengah mereka; (3) Social Equilibrium, keseimbangan sosial yang dibangun oleh zakat menjadikan fakir mendapat bagiannya yang diperoleh dari sebagian kekayaan orang-orang kaya yang ada disekitarnya, sehingga kesenjangan sosial tidak terpaut tinggi; (4) Social Guarantee, masyarakat merasa mendapat jaminan ketika zakat bisa diwujudkan dalam bentuknya, sehingga fakir miskin tidak perlu khawatir untuk berobat atau mendapatkan pelayanan pendidikan karena tiadanya uang jaminan misalnya; (5) Social Safety, sesungguhnya dengan terhimpunnya dana zakat yang besar disamping sebagai modal pembangunan, juga bermanfaat bagi dana siaga yang siap digunakan setiap saat terutama terhadap kejadian-

kejadian di luar dugaan baik bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain. Zakat sudah sejak lama senantiasa menjadi objek studi yang menarik. Oleh karenanya berbagai studi seputar zakat sudah cukup banyak dilakukan, baik pada dataran teoritik maupun pada dataran empirik. Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan tentang studi-studi yang telah dilakukan tentang seputar zakat itu, maka penulis melakukan survey terhadap studi-studi yang dapat diakses. Dari hasil survey terhadap beberapa penelitian seputar zakat, secara umum dapat disimpulkan bahwa maju dan berkembang dengan pengelolaan zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan Muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Namun perlu digarisbawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan - permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Dimana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak.

Pengelolaan zakat di beberapa Negara Muslim sudah mengalami perkembangan yang baik. Contohnya adalah Negara Malaysia. Pengelolaan zakat di Negara Malaysia berada dibawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) berada dibawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). Setiap Majelis Agama Islam mempunyai karyawan dari jawatan Agama Islam.

Selain di Malaysia, ada beberapa negara Muslim yang turut aktif dalam institusi zakat seperti Kuwait yang mempunyai lembaga zakat yang disebut dengan zakat house (darul zakah), yaitu lembaga yang mengelola semua urusan berkenaan dengan zakat dan merupakan salah satu lembaga kerajaan. Begitu juga di Pakistan, yang telah menerapkan institusi zakat kedalam pengelolaannegara. Di beberapa Negara Muslim telah banyak mengembangkan tentang pengelolaan zakat, supaya dana zakat lebih bermanfaat dan berguna untuk semua masyarakat.

2) Dr. Fakhruddin, M.HI. (UIN Maliki Malang)

Dr. Fakhruddin menyampaikan materi dengan tema : Rekontruksi Fikih Zakat: Menuju Era Baru Fikih Zakat di Indonesia. Dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang selama ini telah dan akan dikenal oleh semua umat Islam dimanapun dan kapanpun berada, karena zakat termasuk salah satu rukun Islam (*arkan al-Islam*), disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, maka zakat hukumnya *fardlu 'ain*. Artinya bahwa zakat wajib dilakukan oleh setiap individu umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka zakat merupakan kewajiban yang bersifat *ta'abbudi*. Karena bersifat *ta'abbudi*, maka zakat termasuk dalam bidang yang *unreasonable* (*ghair ma'qul al-ma'na*). Artinya bahwa zakat termasuk bidang dimana akal pikiran tidak memegang peranan yang penting, ijtihad dan qiyas tidak berlaku, bersifat dogmatikal, *taken for granted* (*munazzalah*), tidak boleh ditambah, dirubah atau mengurangi apa yang telah ada.

Namun demikian, penempatan zakat dalam bidang *ta'abbudi* bukan berarti tidak meninggalkan "permasalahan", karena zakat kemudian mengalami stagnan, statis, mandek, dan tidak bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Zakat kemudian menjadi kegiatan rutinitas (ibadah ritual *mahdhah*) yang jauh dari peluang untuk bisa dikembangkan, padahal zakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengangkat harkat dan martabat kaum muslim, terlebih dalam meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, *dhua'afa'*, dan *mustadh'afin*. Oleh karena itu, maka perlu melakukan konstruksi pemikiran ulang untuk menempatkan zakat hanya pada tempatnya selama ini. Penempatan zakat pada fikih ibadah akan menyebabkan zakat menjadi kaku dan tidak fleksibel, sedangkan kalau zakat ditempatkan pada posisi fikih muamalah, maka tentu akan banyak hal yang bisa dilakukan sehingga nantinya zakat akan menunjukkan hasil yang maksimal dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam, khususnya fakir miskin.

Dalam penggunaannya, hukum Islam sering disamakan dengan fikih, bahkan juga dengan syariah meskipun masing-masing memiliki perbedaan. Syariah diartikan sebagai keseluruhan ajaran Islam, sedangkan fikih adalah bagian dari syariah yang membahas hukum Islam. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya baik melalui al-Qur'an maupun al-Sunnah, baik yang berkaitan dengan keyakinan ataupun amal perbuatan. Sedangkan fikih adalah aspek praktis (*al-janib al-amaly*) dari syariah. Dalam perkembangannya, cakupan makna syariah mengalami penyempitan dari semula meliputi semua aspek

Islam, termasuk fikih dan kalam, menjadi identik dengan hukum Islam, dan secara teknis terkadang disamakan dengan fikih, sehingga satu sama lain sering dipertukarkan penggunaannya. Sebagaimana syariah, fikih juga mengalami penyempitan makna, dari semula meliputi semua pengetahuan keislaman, kemudian secara bertahap menyempit, dan akhirnya terbatas pada masalah-masalah hukum, bahkan hanya literatur hukum yurisprudensi. Menurut Qadri Azizy, bahwa fikih dalam perkembangannya mengalami tiga fase, yaitu: pertama, istilah fiqh berarti paham (*fahm/understanding*) yang menjadi kebalikan dari, dan sekaligus menjadi suplemen terhadap istilah “ilm” (menerima pelajaran) terhadap nash, yakni al-Qur’an dan sunah atau hadis Nabi yang keduanya sering disebut *authoritative given*. Kedua, fiqh dan *ilm* keduanya mengacu pada pengetahuan (*knowledge*) yang berarti identik. Oleh karena itu dapat diistilahkan “ilmu agama” atau “fikih tentang materi agama”. Di sini fiqh mengacu pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama secara umum yang meliputi ilmu kalam, tasawwuf, dan lainnya, tidak hanya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum. Ketiga, fiqh berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman, yakni hanya disiplin “hukum Islam”, ada yang menyebutnya dengan “hukum positif Islam” atau “ilmu hukum Islam”.

Secara umum, para ulama’ membagi fikih menjadi dua bagian, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Bagian ibadah meliputi soal-soal akherat seperti iman, shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan bagian kedua (muamalah) meliputi masalah-masalah duniawi dan hukum perundang-undangan. Bagian kedua ini terbagi lagi atas beberapa bagian yang terpenting diantaranya ialah hukum pidana (*jinayat*), hukum nikah (*munakahat*) dan muamalat. Bagian mengenai hukum pidana membahas soal-soal perbuatan pidana atau kejahatan (*jinayat* dan *jarimat*), seperti pembunuhan, pencurian, zina, minum-minuman khamar, menuduh berzina dan lain-lain serta soal-soal pidana atau hukuman (*uqubat*), seperti qishash, hudud, dan diyat. Bagian munakahat atau nikah meliputi aturan-aturan hukum nikah dan talak beserta cabang-cabangnya, seperti iddah, nasab (keturunan), nafkah, pemeliharaan anak, perwalian, wasiat, waris, dan seterusnya. Aturan-aturan mengenai soal-soal tersebut dewasa ini lazim disebut hukum tentang orang atau hukum keluarga. Sedangkan bidang muamalat khusus membahas soal-soal kebendaan dan soal-soal yang bersangkutan dengan masalah kebendaan, seperti hukum perikatan, misalnya jual beli (*ba’i*), sewa menyewa (*ijarah*), hibah, ghasab, pertanggungan, persekutuan, dan seterusnya.

3) KH. Masdar Farid Mas'udi, M.A. (Badan Zakat Nasional)

Kyai Masdar menyampaikan materi dengan tema: Optimalisasi Zakat dalam Menghadapi MEA. Dalam orasi ilmiahnya Kyai Masdar menyampaikan Dewasa ini umat Islam lebih sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa. "Dimana kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk, secara tidak langsung umat Islam lah yang akan rasakannya," itulah realitasnya. Karenanya membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat. Dalam konteks inilah, penggalian terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi.

Selama hampir empat abad, wacana ekonomi dunia lebih banyak didominasi oleh kaukus besar ekonomi, masing-masing kapitalis dan sosialis. Dengan klaim-klaim Universalitas, kedua sistem ekonomi itu telah merambah ke seluruh dunia, termasuk negara-negara yang berbasis Islam. Dunia Islam sendiri tidak bisa berbuat banyak karena powernya sendiri telah direnggut oleh "tangan-tangan" kaum imperialis. Akibatnya, mau tidak mau, masyarakat Islam harus menerima secara lapang dada sistem ekonomi yang telah berkembang secara universal. Dan berbagai interpretasi pun bermunculan hanya sekedar untuk menyelaraskan Islam dengan universalitas sistem ekonomi itu. Meskipun pada akhirnya hal itu justru menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri. Karena sistem ekonomi, terutama kapitalis yang selama ini telah diterapkan di negara-negara Islam, telah terbukti tidak dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam, tatapi malah membelit kehidupan mereka. Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya, bisa dikatakan, sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi).

Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan

persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya.

c. Plennary Session III:

- 1) Dr. Agustianto Mingka, M. Ag (Wakil Ketua Ikatan Ahl Ekonomi Islam)
Dr. Agutianto menyampaikan materi dengan tema: Membangun Sinergitas Lembaga Zakat dengan Lembaga Keuangan. Dalam orasi ilmiahnya menyampaikan Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi zakat cukup besar. Potensi zakat di Indonesia menurut PIRAC mencapai 7,3 triliun rupiah per tahun sedangkan realisasinya hanya 3,3 triliun rupiah per tahun, sedangkan berdasarkan perhitungan FOZ (Forum Zakat) potensi zakat di Indonesia mencapai 17,5 triliun rupiah per tahun dan yang disalurkan melalui lembaga pengelola zakat hanya 350 milyar rupiah per tahun. Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005 menyebutkan bahwa potensi zakat, infaq, dan shodaqoh di Indonesia mencapai 19,3 triliun rupiah per tahun. Angka-angka tersebut akan semakin bertambah dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk membayar zakat, infaq dan shodaqoh, karena saat ini membayar zakat, dan berinfaq telah menjadi *life style* bagi umat Islam di Indonesia sejak maraknya kajian-kajian tentang keajaiban dan keutamaan berzakat dan berinfaq.

Semakin banyaknya lembaga pengelola zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, disamping memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pengelolaan dana ziswaf di Indonesia, ternyata juga menimbulkan masalah lain yaitu ketidakefektifan dalam pengelolaan dana ziswaf di Indonesia. Ketidakefisienan tersebut muncul karena adanya *overlapping* dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di Indonesia. *Overlapping* dalam pengumpulan dana ziswaf itu salah satunya nampak dari kurangnya ekstensifikasi obyek muzaki (wajib zakat). Selama ini semua lembaga pengelola zakat cenderung memiliki obyek muzaki yang sama, sehingga kadang kala dalam satu perkantoran dapat kita jumpai seorang muzaki bisa menjadi pembayar zakat pada dua organisasi zakat yang berbeda. Pada umumnya organisasi pengelola zakat di Indonesia pada saat ini hanya fokus pada wajib zakat personal dengan jenis profesi yang homogen dan tempat kerja yang sama, sehingga rentan menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara organisasi pengelola zakat dalam mencari dan mendapatkan muzaki. Akibat yang lain adalah beberapa potensi zakat

dan muzaki yang lain, seperti zakat perusahaan dan perdagangan, menjadi terabaikan karena semua organisasi pengelola zakat di Indonesia cenderung mengejar muzaki dari kalangan profesional dan karyawan.

Overlapping yang lain adalah dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan dana ziswaf yang terkumpul. Lemahnya sistem data informasi dan tidak adanya komunikasi antara organisasi pengelola zakat memungkinkan seorang mustahiq zakat mendapatkan distribusi dana zakat dari beberapa organisasi pengelola zakat. Akibatnya organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program dengan obyek mustahiq yang sama, sehingga pemerataan pemberdayaan dana ziswaf tidak bisa terwujud secara optimal.

Overlapping dalam pengelolaan dana ziswaf tersebut terjadi karena di Indonesia belum ada institusi yang dijadikan simpul bagi seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk berkoordinasi dan bersinergi. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak menyebutkan secara jelas institusi yang menjadi koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan dana ziswaf, begitu juga institusi tentang pengawasan atas pengelolaan dana ziswaf belum diatur oleh undang-undang tersebut.

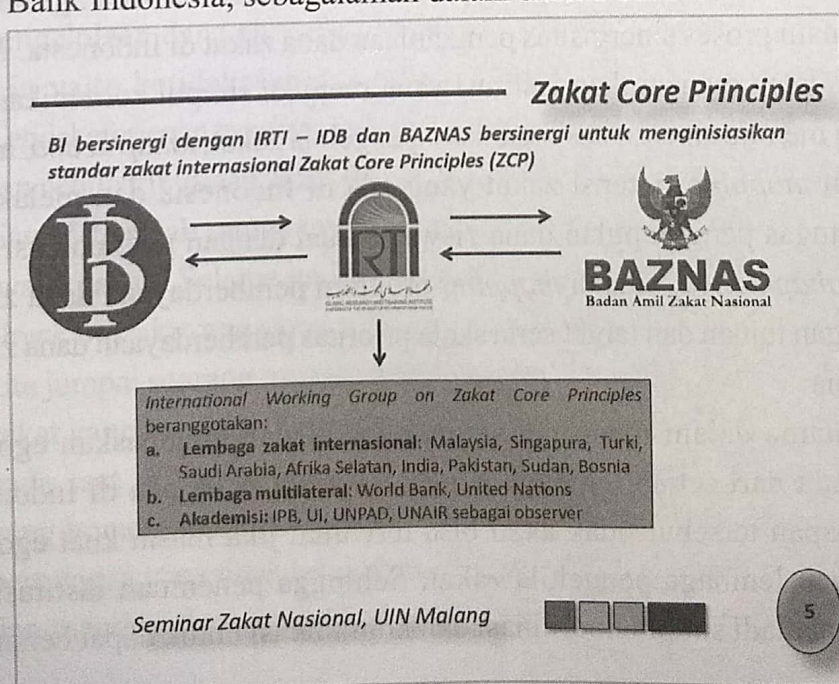
- 2) Jhordy Kashoogie Nazar, M.Sc & Ricky Satria, M.BA. (Bank Indonesia)
Jhordy K. Nazar menyampaikan materi dengan tema: Manajemen Mutu Lembaga Zakat dan Sinergitas Lembaga Zakat. Dalam presentasinya menyampaikan bahwa sinergisitas organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan kunci jawaban atas masalah ketidakefektifan pengelolaan dana zakat di Indonesia selama ini. Sinergitas tersebut akan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keberkahan zakat dalam kehidupan Umat Islam di Indonesia. Ada tiga tahapan penting dalam proses sinergisitas pengelolaan dana zakat di Indonesia. *Tahap pertama*, adalah menentukan institusi yang menjadi simpul komunikasi dan koordinasi menuju sinergisitas organisasi pengelola zakat, *tahap kedua*, adalah melakukan *mapping* potensi zakat yang ada di Indonesia dan melakukan distribusi tugas pengumpulan dana ziswaf sesuai dengan peta potensi yang ada, dan *tahap ketiga*, adalah *mapping* program pemberdayaan dana ziswaf sesuai dengan tujuan dan target serta skala prioritas pemberdayaan dana ziswaf di Indonesia.

Kendala utama dalam mencapai sinergisitas adalah melepaskan egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Ketiga tahapan tersebut tidak akan bisa terwujud jika masih kuat egoisme kelembagaan lembaga pengelola zakat. Sehingga penentuan institusi apa yang bisa menjadi simpul koordinasi dan komunikasi untuk dapat bersinergi

menjadi titik krusial dalam mewujudkan sinergisitas. Hal tersebut nampak dari belum adanya proses koordinasi dan komunikasi antara LAZ dan BAZ, oleh karena itu perlu adanya suatu institusi yang bisa mewadahi seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia serta mengeliminasi sifat egoisme kelembagaan untuk mencapai sinergisitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Pertanyaan berikutnya adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana ziswaf tersebut dilaksanakan oleh siapa?. Selama ini BAZNAS yang berada langsung dibawah presiden akan kurang efektif jika menjalankan fungsi peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang mensinergikan organisasi pengelola zakat di Indonesia, karena BAZNAS/BAZDA adalah salah satu institusi pengumpul zakat yang dikelola pemerintah sehingga rentan egoisme kelembagaan akan masih tetap muncul dari organisasi pengelola zakat yang ada.

Alternatif yang dapat diambil sebagai institusi yang dapat menjadi simpul koordinasi dan komunikasi untuk menciptakan sinergisitas pengelolaan dana ziswaf di Indonesia adalah dengan membentuk kementerian Zakat dan Wakaf yang berfungsi sebagai rumah bersama bagi seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk bersinergi, baik yang dikelola oleh masyarakat (LAZ) maupun dikelola oleh pemerintah (BAZ). Kementerian Zakat dan Wakaf akan menjadi regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana ziswaf di Indonesia. Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai fungsi koordinator, regulator, dan pengawasan dalam pengelolaan dana ziswaf di Indonesia akan menjadi *win-win solution* bagi LAZ maupun BAZ untuk saling bersinergi dengan melepaskan egoisme kelembagaannya, termasuk Bank Indonesia, sebagaimana dalam skema berikut:



Pemerintah dapat mengambil peran dalam memulai membangun sinergisitas dengan menjadi institusi simpul koordinasi dan komunikasi organisasi pengelola zakat di Indonesia yang bersifat netral tanpa harus mengeliminasi atau mematikan peran dari LAZ yang ada. Keinginan pemerintah untuk mengamandemen UU No. 38/1999 untuk menyatukan pengelolaan zakat di bawah pemerintah patut diapresiasi, tetapi jangan sampai keinginan tersebut akan mengeliminasi dan mematikan peran LAZ yang sudah tumbuh dan berkembang saat ini. Oleh karena itu peran pemerintah dalam pengelolaan dana ziswaf di Indonesia harus sebatas sebagai mediator dan koordinator bagi organisasi pengelola zakat di Indonesia serta menjadi pengawas atas pengelolaan dana ziswaf di Indonesia. Sehingga tanggung jawab pemerintah hanya mengkoordinasi, mengkomunikasikan, dan melakukan *mapping* potensi zakat serta program pemberdayaan zakat agar sinergi dengan program-program pembangunan pemerintah untuk pengurangan kemiskinan, dan menjalankan fungsi pengawasan.

3) Dr. Sudirman, M.A. (Mantan Direktur el-Zawa UIN Maliki Malang)

Dr. Sudirman menyampaikan materi dengan tema : Pengelolaan Zakat Berbasis Kampus (Pengalaman di El-Zawa UIN Maliki Malang). Dalam presentasinya menyampaikan bahwa kemungkinan zakat menjadi sumber inti dana untuk bisnis masih menjadi topik pembicaraan yang hangat. Zakat sebagai pilar ketiga dari Islam umumnya dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan atau dukungan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin. Namun, masalah manajemen masih menantang. Banyak sarjana telah memperkenalkan berbagai cara untuk mengurangi kemiskinan dengan menggunakan zakat sebagai alat utama. Baru-baru ini, ide-ide dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama-tama, beberapa dari mereka berpendapat bahwa zakat harus disalurkan konsumtif meskipun distribusi langsung. Kelompok kedua menyatakan bahwa zakat dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan melalui program konsumtif serta program produktif. Program produktif dapat direalisasikan setelah kebutuhan dasar penerima telah dipenuhi sepenuhnya. Metode program yang dengan memperkenalkan atau mendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat miskin. Modal yang diberikan adalah hanya jenis amal. Mereka tidak perlu membayar uang yang sejak zakat dianggap sebagai hak mereka sendiri. Berikutnya, kategori terakhir menegaskan bahwa produktif harus diprioritaskan dalam memberikan zakat karena dapat mendidik masyarakat miskin untuk menggunakan uang secara efektif. Jika tidak, mereka akan menjadi tidak berakhir miskin dan lemah karena mereka hanya berharap terlalu banyak menerima zakat secara teratur. Cara yang paling mungkin untuk

membuat mereka mandiri adalah dengan memberikan pinjaman lunak. Oleh karena itu, mereka harus mengembalikan uang dengan cara tertentu. Untuk melaksanakan ide ini, pendirian bank zakat atau zakat berbasis keuangan mikro tidak dapat dihindari.

Makalah ini berfokus pada kelompok ketiga. Lembaga dieksplorasi dalam makalah ini adalah eL-Zawa, sebagai studi kasus lembaga zakat yang memiliki program zakat produktif melalui keuangan mikro. Selain itu, eL-Zawa adalah lembaga zakat berbasis universitas yang juga berfokus program mereka pada penelitian. eL-Zawa adalah lembaga zakat yang unik berdasarkan kampus. Lembaga ini terletak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang). Suatu munculnya eL-Zawa mulai dari Seminar Zakat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Maliki bekerjasama dengan Manajemen Zakat Institute (IMZ) Jakarta dan Zakat Penelitian Institute, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka Malaysia pada 22 November 2006. Sejak resmi didirikan pada tahun 2007, eL-Zawa memiliki dua kegiatan utama: pemberdayaan sosial dan pusat penelitian. Berbagai program pembangunan telah dilakukan eL-Zawa, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan masyarakat. Sementara itu, untuk memperkuat posisinya sebagai pusat penelitian untuk zakat dan wakaf, eL-Zawa telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti penerbitan buku, pelatihan, dan seminar. Sejak tahun 2007, eL-Zawa telah menyelenggarakan dana dari dosen, pejabat, serta mahasiswa dan mendistribusikan uang untuk membantu petugas lain atau siswa yang memiliki masalah keuangan, melalui pinjaman lunak tanpa bunga. Program ini telah mendapat respon yang baik dari orang-orang dan sekarang eL-Zawa telah membentuk keuangan mikro, yang disebut Bank Zakat eL-Zawa sejak 13 Juli 2013 (elzawa.uin-malang.ac.id). Salah satu fitur dari keuangan mikro ini adalah bahwa bank eL-Zawa tidak mengambil keuntungan dari pelanggan. Meminjamkan uang kepada orang-orang tanpa mengambil keuntungan, seperti bunga atau riba. Itu hanya mendesak donasi kepada pelanggan. Alasan mengapa lembaga ini tidak membuat uang dari program pinjaman karena elzawa memiliki beberapa sumber untuk uang, misalnya, infaq dan manfaat dari bisnis mereka.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, misalnya, melalui bank zakat atau keuangan mikro. eL-Zawa telah berhasil menerapkan semacam ini keuangan mikro. Mudah-mudahan, ide ini dapat diadopsi oleh lembaga zakat lain untuk menyalurkan zakat produktif. Dengan demikian, kerjasama antara berbagai elemen, termasuk pemerintah, universitas, dan lembaga zakat,

sangat dihormati untuk membuat zakat sebagai alat perubahan sosial mungkin menjadi kenyataan.

d. Plenary Session IV:

1) Prof. Dr. Abdul Halim (UiTM Malaysia)

Prof. Halim menyampaikan materi tentang: "Perkembangan Zakat Kontemporer di Malaysia". Dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa pada tahun 1978, pemerintah Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayaran zakat individu dapat menjadi pengurang pajak. Pada tahun 1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada perusahaan yang membayar zakat dengan potongan sangat kecil. Jika pembayaran zakat individu dapat menjadi pemotongan pajak 100 persen, pada tahun 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak hanya sebesar 25 persen saja. Pemerintah Malaysia masih belum menerima usulan agar zakat perusahaan dapat mengurangi pajak 100 persen. Karena itulah persidangan ini juga diselenggarakan dalam rangka mengkaji usulan kemungkinan zakat perusahaan dapat menjadi pengurang pajak perusahaan 100 persen, di mana pemerintah Malaysia masih terus mempertimbangkannya.

Dari data pengumpulan zakat dan pajak di Malaysia disebutkan bahwa penerimaan zakat negara pada tahun 2009 adalah sebesar RM 1,2 miliar, sementara penerimaan pajak negara adalah sebesar RM 75 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan zakat Malaysia berbanding penerimaan pajak adalah sebesar 1,6 persen. Di Malaysia sendiri setelah diberlakukannya zakat pengurang pajak (khususnya zakat individu yang sudah 100 persen), ternyata data penerimaan penerimaan zakat dan pajak selama tiga tahun terakhir kedua-duanya terus mengalami peningkatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Perbandingan Penerimaan Zakat dan Pajak Malaysia (dalam miliar RM)

Tahun	Zakat	Pajak
2007	600	65,7
2008	1040	70
2009	1197	75

Berdasarkan hasil kajian berbagai pihak di Malaysia, yang menjadi faktor penyebab kenaikan pengumpulan zakat di Malaysia adalah : 1) Kampanye zakat yang semakin meluas, 2) Adanya zakat sebagai pengurang pajak, dan 3) Peningkatan kesadaran berzakat umat Islam di Malaysia. Sementara cara pembayaran zakat yang paling banyak dilakukan oleh muzakki (pembayar zakat) di Malaysia adalah melalui pemotongan secara langsung gaji para pegawai pemerintah atau karyawan perusahaan swasta.

Tentu saja dalam pandangan masyarakat Malaysia, masalah utama zakat

adalah masalah pendistribusian. Meskipun uang zakat yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat negeri di Malaysia besar, akan tetapi kalau orang miskin terus semakin banyak, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan zakat. Di Malaysia saat ini jumlah orang miskin adalah sebesar 3,5 persen dari total populasi penduduk Malaysia yang berjumlah 25 juta jiwa. Menyadari hal ini, institusi zakat di Malaysia dituntut untuk semakin kreatif dan bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan zakat guna menolong dan mengurangi jumlah orang miskin di Malaysia.

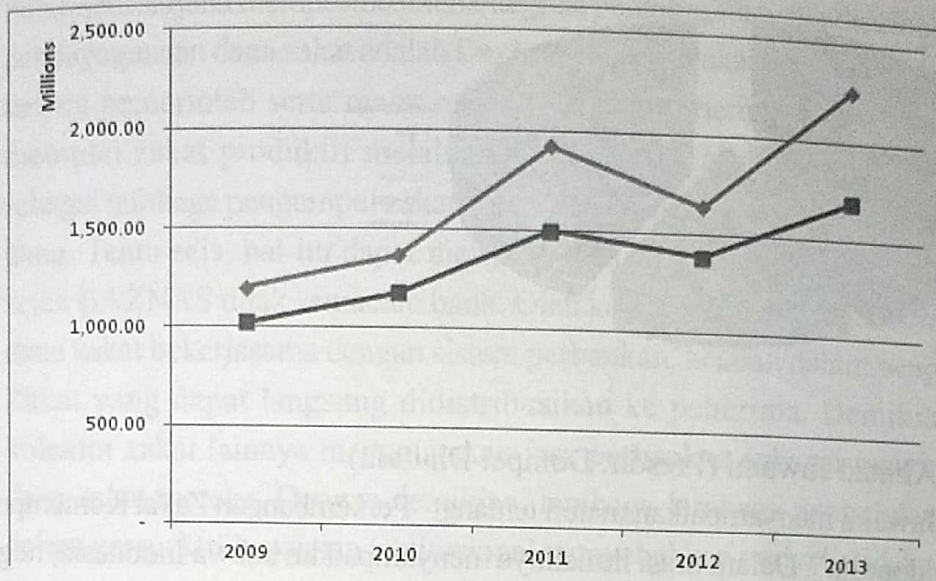
Dengan berlandaskan kepada banyaknya persoalan yang masih harus diatasi dalam perkembangan zakat di Malaysia, termasuk masalah mengupayakan agar zakat perusahaan dapat menjadi pengurang pajak perusahaan 100 persen, juga masalah peningkatan efektivitas pemanfaatan zakat dan penyamaan persepsi semua pemangku kepentingan zakat di Malaysia untuk masa mendatang, maka pada persidangan zakat dan cukai 2010 ini dideklarasikan berdirinya Forum Zakat Malaysia (FZM).

Adapun Visi FZM adalah: zakat sebagai wadah dalam pembangunan ummah dan ekonomi negara, sedangkan misinya adalah : 1) memartabatkan zakat melalui aktivitas perkongsian ilmu, pengalaman, penyelidikan, dan jaringan industri, 2) menjadikan zakat antara instrumen penting dalam aliran pendanaan perdana pembangunan negara.

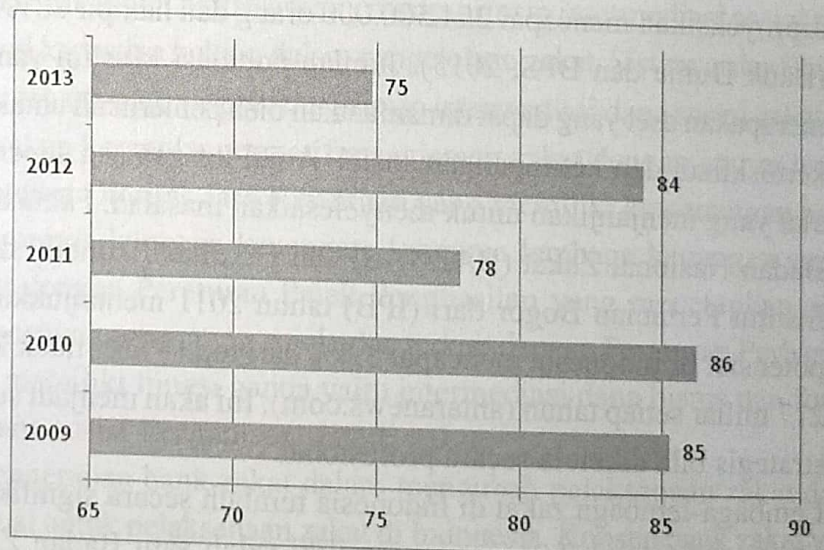
FZM bertujuan : 1) mengumpulkan organisasi, individu, industry, dan pelbagai pihak berkaitan, 2) berkongsi ilmu, pengalaman dan pandangan dalam hal ehwal zakat, 3) menyumbang ke arah amalan tadbir urus yang profesional, 4) Menyebarluaskan informasi dan perkembangan zakat, 5) membudayakan dan memasyarakatkan amalan berzakat.

Dalam perkembangannya pengelolaan zakat di Malaysia sampai tahun 2009 -2013 adalah sebagaimana pada table berikut:

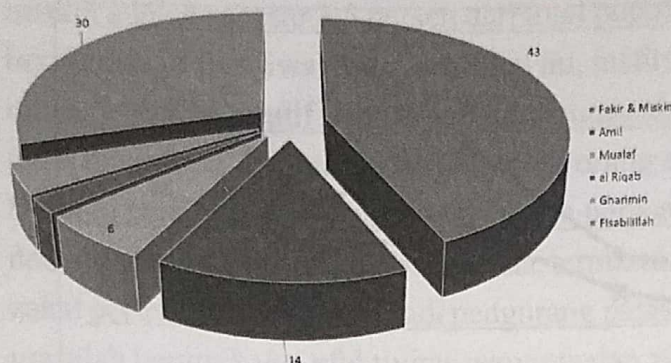
ZAKAT COLLECTION & DISTRIBUTION IN MALAYSIA, 2009-2013



Average Zakat Fund Distributed in Malaysia, 2009-2013* (%)



Zakat Distribution by Asnaf , 2013 (%)



2) Dr. Ahmad Juwaini (Presdir. Dompot Dhu'afa)

Dr. Juwaini menyampaikan materi tentang: "Perkembangan Zakat Kontemporer di Indonesia". Dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim sebagai, berusaha untuk mengatasi hambatan ekonomi negara melalui potensi amal. Tampaknya memiliki beberapa kesulitan dalam mengelola dana sosial berbasis agama ini sementara total penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 254.500.000 orang dan hampir 88% adalah Muslim (Bank Dunia dan BPS, 2015). Jumlah populasi Muslim yang sangat besar merupakan aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Amal keagamaan seperti zakat adalah alat yang menjanjikan untuk menyelesaikan masalah. Fakta diterbitkan oleh Badan Nasional Zakat (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor dari (IPB) tahun 2011 menunjukkan bahwa zakat potensial di Indonesia mencapai 3,4% dari total PDB, tidak kurang dari Rp. 217 miliar setiap tahun (antaranews.com). Ini akan menjadi sumber ekonomi strategis bila dikelola secara profesional.

Lembaga-lembaga zakat di Indonesia tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia memiliki salah satu Badan Zakat Nasional, 34 Lembaga di tingkat Provinsi, 93 Dewan Zakat di tingkat Kota, dan 398 Dewan Zakat di tingkat Kabupaten. Sementara itu, masyarakat memiliki 22 Lembaga Zakat yang telah mendapatkan legalitas hukum dan 52 Lembaga Zakat yang belum mendapat legalitas hukum baik di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten / kota. Badan publik untuk pelaksanaan inisiatif amal belum termasuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para pemimpin agama seperti yayasan, ulama, da'i, dan lain-lain. Dengan demikian, potensi besar ini zakat

harus menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, seperti para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan pemikir agama dengan memperkenalkan sistem manajemen zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, termasuk hubungan zakat pajak.

Salah satu sarjana mempromosikan integrasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat adalah Dakhoir. Dalam makalahnya, ia menegaskan bahwa pemerintah serta masyarakat harus lebih memperhatikan zakat dan memulai zakat produktif melalui sistem perbankan. Misalnya, BAZNAS sebagai lembaga pengumpul zakat melakukan pengelolaan zakat dalam bentuk uang. Tentu saja, hal itu dapat menyebabkan ketidakpastian status lembaga sejak BAZNAS tidak semacam bank. Oleh karena itu, BAZNAS menyimpan dana zakat bekerjasama dengan sistem perbankan, kecuali dalam pengelolaan Zakat yang dapat langsung didistribusikan ke penerima. Demikian juga, kolektor zakat lainnya menggunakan jasa perbankan sebagai penyimpanan dana zakat mereka. Dengan demikian, lembaga-lembaga pengelolaan zakat dalam perspektif kepastian institusional menyebabkan peran ketidakakuratan ketika mereka tidak bekerja bergandengan tangan dengan bank.

Selanjutnya, pengelolaan zakat dalam bentuk uang harus dibangun berdasarkan manajemen terpadu dari zakat. Penyusunan manajemen terpadu dari kerangka normatif zakat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip intermediasi sosial dana zakat dan teori kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Sistem order Hukum pengelolaan zakat mengintegrasikan prinsip intermediasi dana sosial zakat dan menghubungkan kerangka normatif manajemen zakat dengan aturan terkait seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi semua lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan seperti bank terkait dengan Peraturan Pajak Penghasilan yang menetapkan zakat yang dapat menjadi pengurang pajak, dan terkait dengan Peraturan Perbankan Islam yang memiliki fungsi ganda yaitu intermediasi dana bisnis dan fungsi perantara dana sosial-keagamaan seperti zakat.

Selain itu, penerapan bank zakat dalam mengubah pelaksanaan zakat dapat menjadi solusi untuk pelaksanaan zakat di Indonesia. Konsep bank zakat yang memprioritaskan aspek usaha sosial dan berfungsi sebagai lembaga sosial untuk intermediasi keuangan telah menyadari sistem terpadu pengelolaan zakat. Arti dari sebuah manajemen terpadu posisi pelaksanaan pengumpulan zakat yang terhubung dengan baik organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat dalam mengelola dana zakat. Bank drama zakat sebagai rumah harta terakhir atau (umpan al-mal) untuk pengumpulan zakat dan menjadi rumah properti pertama di dana zakat.

Kehadiran bank dalam pengelolaan terpadu dari zakat dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat, karena sistem perbankan dibangun dengan bentuk dengan sistem terpadu yang mengintegrasikan lembaga produk zakat pemerintah, lembaga produk zakat dari masyarakat dan pemantauan sistem dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pajak penghasilan. Masalah kontrol dan pengawasan dana zakat, termasuk dana dalam perspektif yang ideal telah menempatkan peran OJK di masa depan untuk mengawasi lembaga keuangan termasuk zakat, dana haji dan dana lainnya. Pengembangan institusi ekonomi Islam seperti bank zakat akan menjadi terobosan dari sistem akuntabel paling canggih yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat yang memastikan distribusi yang tepat dari properti dari orang kaya kepada orang miskin. Solusi alternatif pengelolaan zakat yang efektif dan efisien adalah melalui lembaga pengelolaan zakat yang terintegrasi. Lembaga bersatu manajemen terpadu dari zakat yang efektif, efisien dan akuntabel adalah lembaga perbankan syariah melalui yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai dana perantara dari laba bisnis dan sebagai lembaga intermediasi atau dana amal lembaga sosial keagamaan seperti zakat khusus dari fungsi perbankan syariah sebagai perantara dana sosial (agama) seperti zakat adalah dasar rasional pembentukan badan amal atau bank zakat.

Tepi zakat dibentuk berdasarkan aspek filosofis yang zakat sebagai instrumen ekonomi agama menyadari keadilan ekonomi zakat berdasarkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah (tujuan hukum Islam) yang menjamin pemeliharaan agama adalah zakat, dijamin sirkulasi zakat dan keselamatan penerima alm tersebut. Bank zakat dibentuk berdasarkan aspek yuridis bahwa pelaksanaan alm harus diintegrasikan berdasarkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan alm tersebut. Sebuah kepastian hukum terpadu menempatkan posisi dasar intermediasi keuangan sosial dan perusahaan sosial dalam regulasi keuangan syariah yang harmonis terkait dengan undang-undang OJK, BPK, PPATK, KPK dan pajak penghasilan. Bank zakat dibentuk berdasarkan aspek-aspek sosiologis bahwa penerapan sistem zakat dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan. Tepi zakat sebagai bank khusus mengelola zakat sebagai dana perwalian menempatkan dana kepercayaan sebagai kepercayaan dari pemberi yang harus diserahkan dan digunakan sesuai dengan Syariah yang didasarkan pada sumbangan untuk mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Sarjana lain yang memiliki ide mengintegrasikan zakat ke lembaga keuangan mikro adalah Ibrahim. Dia dengan jelas menyatakan bahwa zakat dapat menjadi mekanisme untuk pembiayaan mikro di kalangan masyarakat Muslim, yang

disebut-jadi-Zakat Keuangan Mikro (ZMF). Ada beberapa instrumen non-profit dana pengamanan, misalnya, zakat, sadaqah, dan waqaf. Ini semua adalah sumber dana untuk mekanisme keuangan mikro dan di antara berbagai bentuk bantuan keuangan yang dapat diberikan kepada Muslim miskin dan yang membutuhkan untuk meningkatkan standar sosial-ekonomi hidup mereka. ZMF dapat menuntut serta usaha yang menguntungkan. Dia berpendapat bahwa pengecualian dari orang miskin dari sistem keuangan telah menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Mikro dapat mempekerjakan tenaga kerja surplus produktif. Oleh karena itu, pertumbuhan usaha mikro atau usaha kecil dapat meningkatkan perekonomian dan bertanggung jawab secara sosial dengan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan. Selanjutnya, ZMF harus menghindari praktek keuangan mikro konvensional. Ini tidak akan menimbulkan dua hambatan utama untuk Muslim miskin. Kendala pertama adalah dalam bentuk persyaratan agunan yang biasanya di luar kemampuan mereka. Kendala kedua adalah perintah agama terhadap bunga (riba). Oleh karena itu, alternatif Islam sebagai ZMF mempromosikan harus diperhitungkan. Distribusi zakat diklasifikasikan menurut penggunaan dana, baik dalam bentuk konsumsi atau produksi. Distribusi zakat konsumtif diberikan terus menerus untuk keperluan konsumsi untuk jangka waktu yang relatif lama. Ini mencakup biaya makanan, tempat tinggal, transportasi, obat-obatan dan pendidikan. Jenis bantuan terutama diberikan kepada kelompok non-produktif. Di sisi lain, distribusi zakat produktif diberikan untuk keperluan produksi untuk penerima yang produktif. Bantuan ini memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan standar hidup mereka. Bantuan zakat akan diberikan kepada penerima untuk membiayai proyek-proyek ekonomi mereka untuk tujuan produksi dan kelangsungan hidup jangka panjang. Dalam jangka panjang, mereka diharapkan menjadi mandiri dan produktif dan mampu membayar zakat imbalan. Bantuan yang diberikan kepada mereka akan berhenti setelah mereka telah mencapai tingkat ini. Berbeda dengan bantuan konsumtif yang diberikan terus menerus, bantuan produktif diberikan untuk waktu singkat saja. Tujuan utamanya adalah untuk penggunaan yang produktif dan efektif sumber daya untuk memberantas kemiskinan.

e. **Forum Dekan Syariah/Hukum**

Forum Dekan Syariah/Hukum dipimpin oleh Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Roibin, M.HI. Adapun tema dari Forum Dekan tersebut adalah: "Reformulasi Kurikulum Syariah untuk Memperluas Peluang Sarjana Hukum Islam sebagai Praktisi Hukum

tanpa Diskriminasi di Indonesia.” Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pertemuan dilakukan setiap tahun sebanyak dua (2) kali, diawal atau di akhir tahun;
- 2) Pertemuan ADSI melibatkan juga dari unsure prodi dengan menyesuaikan tema seminar, dan sekaligus peserta unsure prodi mendapat izin dan SPPD dari fakultas masing-masing;
- 3) Pembentukan pengurus ADSI di tingkat wilayah;
- 4) Masalah perubahan gelardari SHI ke SH dengan merekomendasikan 6 dekan sebagai presidium tim dekan pengawal perubahan. Mereka adalah secara berurutan. 1. Dekan Malang, Dr. Roibin, 2. Makasar. bapak Dar-russalam Makasar 3. Jakarta, 4 Aceh, 5 Jogjakarta, 6 Banjarmasin (UIN Banjarmasin).
- 5) Melaksanakan kajian akademik atas perubahan gelar, dengan biaya oleh 6 dekan yang ditunjuk forum dekan yang dilakukan secara aklamatif dan persetujuan bersama;
- 6) Melaksanakan kegiatan serupa dalam waktu yang dekat di Jakarta;
- 7) Penguatan peran prodi dalam menunjang akreditasi fakultas, dan
- 8) Konsorsium keilmuan perlu untuk ditingkatkan yang dimulai dari prodi.

Pertimbangan SHI menuju SH

Banyak ahli hukum umum praktek di pengadilan agama, sementara SHI tidak boleh praktek di pengadilan umum. SH dianggap pantas untuk lulusan UIN karena mereka adalah sarjana hokum juga sama dengan lulusan sarjana Hukum lainnya dari Universitas umum. Tidak perlu dibedakan, mengingat semua adalah sarjana hokum dan berhak untuk praktek di pengadilan. Dan juga gelar SH lebih banyak diminati oleh mahasiswa. Seluruh forum dekan sepakat untuk melakukan perubahan ini, dan berharap ada kajian pra-akademik bersama bapak. Prof. Dr. H. Mahfud MD yang telah pernah menggagas perubahan ini.

4. Penutup

International Seminar on Zakat dengan tema: “*Strengthening Zakat For Socio Economic Development*”. Yang dimeriahkan oleh Ekspo Zakat Badan Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang ada di kota Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ditutup pada pukul 17.30 – 18.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 oleh Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

C. Tahapan Pasca Kegiatan

1. Rapat-rapat evaluasi

Setelah *International Seminar on Zakat* ditutup oleh Dr. H. Roibin, M.H.I., maka proses *International Seminar on Zakat* telah berakhir. Maka, panitia mengadakan rapat evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan secara keseluruhan mulai dari berkas-berkas pendaftaran peserta, makalah, sampai pada proses pelaporan. Sedangkan monitoring dilakukan untuk memonitor kinerja panitia, kehadiran peserta, sampai pada narasumber yang tidak bisa hadir karena sebab-sebab tertentu.

2. Keputusan Hasil Evaluasi dan Monitoring

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia adalah :

- a. Mengevaluasi kinerja panitia. Sebagaimana pada bab sebelumnya bahwa panitia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan untuk bekerja dan mensukseskan kegiatan *International Seminar on Zakat*. Dari hasil evaluasi bahwa semua panitia yang tercantum dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja maksimal sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- b. Mengevaluasi Narasumber. Narasumber *International Seminar on Zakat* ini dari menyampaikan materi sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- c. Mengevaluasi Materi. Materi yang disampaikan sesuai dengan dinamika perkembangan zakat di negara-negara muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia yang berkembang di belahan dunia.

3. Kegiatan Pembuatan Laporan

Penyusunan laporan adalah bagian dari terpenting dalam kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan hasil dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan laporan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dari kepanitiaan untuk memberikan laporan masing-masing seksi berikut hasil evaluasi dan monitoring serta dokumen terkait lain sebagai bahan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Penyusunan laporan *International Seminar on Zakat* ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, penyusunan laporan ini dilampiri berkas-berkas atau data-data yang mendukung akuntabilitas kegiatan yang dapat diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lampiran-lampiran kegiatan tersebut meliputi: jadwal Pelaksanaan, surat menyurat, form kesediaan, presensi peserta, dan makalah. Dari hasil laporan ini, dapat mempermudah universitas dalam melaporkan

kegiatannya kepada negara melalui Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan.

Closing

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum *International Seminar on Zakat* dengan tema: "*Strengthening Zakat For Socio Economic Development*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didukung oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil dilaksanakan, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki di masa depan. Penilaian terhadap keberhasilan dan suksesnya acara ini diukur melalui pengamatan panitia terhadap proses mulai dari tingkat kehadiran panitia dalam rapat, pemilihan narasumber, penjemputan narasumber, lokasi tempat peserta bermalam, sampai kepada penjemputan peserta. Da hal lain yang dianggap mendukung dalam suksesnya acara *International Seminar on Zakat* tersebut.

Pembuatan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia untuk melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, laporan ini bisa digunakan sebagai pijakan untuk melaksanakan kegiatan yang sama pada masa-masa mendatang.



International
SEMINAR
on Zakat

Financial inclusiveness of the poor: beyond microfinance



UIN-MALI KI PRESS
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile 0341-573225
E-mail: uinmalikipress@gmail.com
Website://press.uin-malang.ac.id

ISBN: 978-602-1190-56-2



9 786021 190562